

**PELAKSANAAN FUNGSI SOSIALISASI POLITIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK PADA  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014  
(Studi diKelurahan Darat Sekip Kota Pontianak  
Provinsi Kalimantan Barat)**

Oleh  
**EPARIA**  
NIM. E02111003

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

*email: [evakristina86@gmail.com](mailto:evakristina86@gmail.com)*

**Abstrak**

Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapannya terhadap gejala politik. Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terkait rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat Di Kelurahan Darat Sekip pada Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan penelitian pelaksanaan fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak belum mampu mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara penuh khususnya di Kelurahan Darat Sekip. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melakukan sosialisasi dengan menawarkan program-programnya, semua itu belum bisa mengambil hati dan simpati masyarakat Darat Sekip, terlihat dari jumlah penggunaan hak pilih yang di peroleh hanya 59%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu Pola Sosialisasi, Sosial Ekonomi, Sistem Politik, dan Penyampaian Pesan.

Kata-kata Kunci : Sosialisasi Politik, Pemilihan Umum Legislatif, Pola Sosialisasi, Sosial Ekonomi, Sistem Politik, Penyampaian pesan

**Abstract**

Political socialization is a process of how the political system introduced to someone, and how the person determining its response to the political symptoms. As for the purpose of this study was to determine the factors that affect the implementation of political socialization function Pontianak City Election Commission related to the low use of suffrage societies in the Village Land Sekip the legislative election of 2014. Based on the study the implementation of political socialization function performed by the Election Commission Pontianak city has not been able to invite people to use their voting rights in full, especially in Sub Sekip Army. Although the Election Commission Pontianak City has the program by offering its programs, it has not been able to win the hearts and sympathy of society Sekip Army, seen from the amount of use of suffrage that was obtained only 59%. The results showed that there are four factors that affect the implementation of the socialization function performed Pontianak City Election Commission ie Sosialisasi Patterns, Socioeconomic, Political System, and Delivery Messages.

*Keywords: Political Socialization, Legislative Election, socialization patterns, Socio-Economic, Political System, Submission messages.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana dalam negara demokrasi pemerintahan dipegang oleh rakyat melalui sistem perwakilan. Pemilu atau lebih dikenal dengan Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 8 dimana disebutkan bahwa KPU mempunyai Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diantaranya:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menetapkan peserta Pemilu;
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- d. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Adapun Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Pontianak di Kelurahan Darat Sekip yaitu Sosialisasi melalui media surat kabar, radio, spanduk, leaflet, stiker, baliho yang tersebar di Kelurahan Darat Sekip, selain itu sosialisasi yang dilakukan melalui simulasi di TPS Kelurahan Darat Sekip, serta mengajak masyarakat berkumpul di balai posyandu. Berdasarkan data yang ada, bahwa tingkat penggunaan hak pilih terendah secara konsisten berada pada Kelurahan Darat Sekip, yaitu hanya sebesar 59%. Presentase tersebut dianggap peneliti rendah jika dibandingkan kelurahan lainnya yang berada di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sehubungan dengan pelaksanaan fungsi sosialisasi politiknya sebagai penyelenggara pemilu dengan mengambil judul “Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Di Kelurahan Darat

sekip Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)”

## **2. Rumusan Permasalahan**

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik KPU Kota Pontianak terkait penggunaan hak pilih yang rendah pada Pileg 2014 diKelurahan Darat Sekip.

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui faktor-factoryang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik KPU Kota Pontianak terkait penggunaan hak pilih yang rendah pada Pileg 2014 diKelurahan Darat Sekip.

## **4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis manfaat penelitian ini, diharapkan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik.
- b) Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk KPU Kota Pontianak.

## **B. TINJAUN PUSTAKA**

### **1. Konsep Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik adalah proses di mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Proses tersebut hakikatnya merupakan upaya mempelajari nilai-nilai atau budaya politik masyarakat. Menurut Rush dan Althoff (2011:47) bahwa Sosialisasi Politik suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

### **2. Proses dan Metode Sosialisasi Politik**

Easton dan Dennis (dalam Rush dan Althoff 2011:34) mereka berdua mendefinisikan sosialisasi politik secara sederhana sebagai suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Bagaimana orientasi dan tingkah laku politik itu diperoleh, serta hasilnya tetap merupakan bahan permasalahan penyelidikan.

Dari uraian tersebut mencoba menelusuri proses sosialisasi melalaui

berbagai tahap sejak dari awal kanak-kanak sampai tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Hal tersebut tidak menekankan satu proses sendiri (selalu berubah-ubah) dan proses mutlak dari sosialisasi, yang tidak memungkinkan terdapatnya variasi dari sistem politik yang satu kepada sistem politik lain. Sosialisasi diartikan sebagai satu proses yang berkesinambungan sepanjang hidup, dan mempengaruhi anak, para remaja, dan orang dewasa.

Easton dan Dennis (dalam Rush dan Althoff 2011:57) mengutarakan empat tahap dalam sosialisasi politik dari anak-anak, yaitu:

- a) Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi;
- b) Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah;
- c) Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti Kongres, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara (pemilihan umum)
- d) Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini, sehingga gambaran yang diidealisasi mengenai pribadi-pribadi khusus seperti presiden atau seorang anggota

kongres telah dialihkan kepada kepresidenan

### 3. Pendidikan Politik

Menurut Almond dalam Kantaprawira (1985:58) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Berikut, menurut paham politik yang totaliter, rakyat dididik, direkrut untuk dijuruskan ke arah mobilisasi. Di lain pihak, di beberapa negara yang sedang berkembang, perpaduan antara partisipasi dan mobilisasi sering menjadi ciri utamanya, baik untuk waktu yang tak terbatas maupun temporer.

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. **C.2. Subjek dan Obyek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini menggunakan teknik purposive, teknik purposive nantinya mengambil sampel data dengan pertimbangan tertentu, orang-orang yang dijadikan informan adalah:

- a) Ketua KPU Kota Pontianak
- b) Sekretaris KPU
- c) Kepala Bagian Sosialisasi
- d) Lurah Darat Sekip
- e) Ketua PPS Kelurahan Darat Sekip
- f) Masyarakat diKelurahan Darat Sekip (8 orang)

Adapun objek dalam penelitian ini tertuju pada Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Pada Pemilihan Legislatif 2014 diKelurahan Darat Sekip.

### 2. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Pertama, yaitu wawancara terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan. Kedua, yaitu dokumentasi untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian ini seperti

Rekapitulasi Hasil Penggunaan hak pilih masyarakat di Kelurahan Darat Sekip yang diperoleh dari KPU Kota Pontianak.

### 3. Teknik Analisis

Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Adapun analisis data kualitatif secara interaktif adalah sebagai berikut:

- a) Reduksi data yaitu membuat catatan penting atau rangkuman inti dari data yang diperoleh melalui wawancara dan telaah kepustakaan.
- b) Penyajian data yaitu menyajikan semua data dan informasi yang telah disusun dan diklasifikasikan dalam bentuk catatan dan tulisan.
- c) Verifikasi/kesimpulan data yaitu membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian.

## D. PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan sosialisasi politik Kpu Kota Pontianak di Kelurahan Darat Sekip yaitu:

### 1. Pola Sosialisasi Politik

Sebagai agen sosialisasi Kpu Kota Pontianak diharapkan dapat mensosialisasikan Pemilu melalui mekanisme yang telah

ditentukan sehingga dapat diterima masyarakat secara baik dan mudah dipahami. Pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu lembaga KPU dalam pelaksanaan sosialisasi politik pada pemilu. Bagaimana pengurus sebagai agen sosialisasi dapat mensosialisasikan pemilu melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat meningkatkan penggunaan hak pilih masyarakat, apabila pola-pola ini tidak terlaksana dengan baik maka yang terjadi penggunaan hak pilih masyarakat akan turun.

Dari data wawancara yang penulis lakukan dengan informan ataupun orang yang penulis anggap mampu memberikan informasi secara akurat, terkait pelaksanaan fungsi sosialisasi politik KPU Kota Pontianak yaitu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sujadi, S.Ag., M.Si (selaku Ketua KPU Kota Pontianak) beliau mengatakan bahwa: “kami telah melakukan Sosialisasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab KPU sebagaimana mestinya, dalam melakukan sosialisasi kami telah melibatkan perwakilan masyarakat seperti melibatkan relawan demokrasi yang tiap-tiap elemennya hanya terdiri dari 5 (lima) orang, kami rasa jumlah elemen yang membantu kami sudah cukup hanya saja kalau sampai ketinggian kelurahan kami menyerahkan keKPPS Kelurahan masing-masing, mereka yang melakukan sosialisasi di KPPS masing-masing sudah dibekali dengan bagaimana melakukan sosialisasi

yang tepat ke masyarakat. dalam mereka tidak hanya melakukan sosialisasi dengan sembarangan tentunya dengan melakukan sosialisasi kemasyarakat yang mengutamakan nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas.”

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan sosialisasisesuai dengan mekanisme yang ada agar masyarakat diKelurahan Darat Sekip menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014. Maka dari itu terdapat beberapa program yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak dalam mensosialisasikan Pemilu tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ira Listiani (selaku Kasubag teknis & humas) yaitu:

“Sosialisasi yang kami lakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung sudah sangat sesuai aturan. Namun disisi lain kami tidak dapat langsung terjun keseluruh elemen masyarakat karena selain kekurangan tenaga sosialisasi kami juga memiliki kendala keterbatasan waktu”

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Ana Suardiana, SH selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bahwa :

“Kami selaku penyelenggara pemilu memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan hasil pemilihan umum, agar hasil pemilihan umum tersebut

maksimal kami telah berusaha menyampaikan bahwa akan adanya pemilihan umum Legislatif 2014 kepada masyarakat melalui sosialisasi. Selain itu kami juga telah mengundang seluruh kelurahan dalam agenda kami seperti simulasi yang diadakan di kantor Kpu Kota Pontianak pada 20 Maret 2014. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang kami keteteran dalam waktu karena dalam melakukan pemilihan umum butuh waktu yang maksimal.

Sesungguhnya pola pemeliharaan hubungan dengan masyarakat juga merupakan bentuk dari pelaksanaan mekanisme pola sosialisasi politik, dimana Kpu Kota Pontianak sudah melakukan sosialisasi dengan baik, namun minimnya waktu yang ada bisa menjadi komunikasi tidak terjalin dengan baik kepada masyarakat, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi politik Kpu Kota Pontianak.

## **2. Faktor Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sosialisasi politik, karena tidak dapat dipungkiri bahwa memang kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik formal. Dalam melakukan sosialisasi Diperlukan biaya yang cukup besar untuk mengelola sebuah program yang ada agar terbentuk

sempurna karena Kesediaan anggaran dana yang besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki. Sosial ekonomi yakni lemahnya sumber-sumber keuangan dalam membangun suatu organisasi politik menjadi kendala KPU Kota Pontianak dalam mensosialisasikan pemilu.

Masalah terbesar dalam mengelola sebuah sosialisasi politik adalah soal ekonomi, karena ekonomi yang tidak memadai akan memperlambat kerja suatu lembaga baik itu Kpu Kota nya maupun tingkatan yang lebih rendah seperti lurah dan Rt. Adapun dana yang dikeluarkan untuk melakukan sosialisasi melalui media massa dan elektronik dilansir dari rincian kertas kerja satker t.a 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berjumlah 66.350.000 yang mana setiap Lurah mendapat dana sosialisasi sebesar 1juta/Lurah.

Terkait dana yang ada pada sosialisasi pemilu legislatif 2014 masih dirasakan minim bagi penyelenggara pemilu itu sendiri , Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sujadi (Ketua Kpu Kota Pontianak):

“ Dana yang ada saat Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014, bisa dikatakan masih minim, karena banyaknya program yang mesti kita jalankan untuk melakukan sosialisasi, karena selain program tersendiri yang dilakukan Kpu Kota Pontianak dari Kelurahan juga melakukan sosialisasi

tersendiri yang mana dananya disumbangkan Kpu Kota Pontianak”

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Bapak Mulyono (selaku Ketua PPS Kelurahan Darat Sekip) berpendapat bahwa:

“Menurut saya kendala sosial ekonomi cukup mempengaruhi dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat karena dibutuhkan dana yang cukup agar dalam melakukan sosialisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, karena cukupnya dana akan mempermudah proses sosialisasi tersebut”

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Xaperius Ijuk (Lurah Darat Sekip)

“Kurang mendukungnya sumber daya keuangan yang memadai serta akses yang terbatas terhadap sumber pendanaan yang dibutuhkan, Kurangnya sumber pendanaan terlihat dari kondisi ekonomi Kpu kota Pontianak. Kurangnya dana dalam pelaksanaan pemilu tersebut seperti Ketua PPS Darat Sekip menggunakan fasilitas yang ada diKelurahan untuk melakukan sosialisasi.

### 3. Faktor Sistem Politik

Berbicara mengenai sistem politik, yang mana organisasi melalui masyarakat berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu dibutuhkan sosialisasi seperti yang

diungkapkan oleh seorang ahli sosiolog politik M.Rush 1992 (dalam Budiardjo,2008:407) menegaskan bahwa melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Disisi lain fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Dalam setiap sistem yang ada tentu terdapat tahapan mengenai bahasan masa demokrasi Pancasila, dan tidak lengkap jika tidak membahas masalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Ibu Ana Suardiana,SH (selaku Sekretaris Kpu Kota Pontianak) sebagai berikut :

“Dalam kaitannya dengan sosialisasi sistem politik yang ada sekarang yang selalu berubah-ubah sehingga membuat masyarakat cenderung apatis karena memang terlalu banyak perubahan baik dari partai politiknya, maupun dari sikap para kader dari partai politik tersebut”.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Ira Listiani (Kasubag teknis dan humas) bahwa:

“ Cara berpolitik yang salah akan membuat masyarakat merasa tidak percaya akan partai politik maupun perseorangan, oleh sebab itu partai politik harus diverifikasi dulu, apakah visi dan misi dari

parpol tersebut sudah tepat dan mengambil simpati masyarakat sehingga dapat mempengaruhi penggunaan hak pilih masyarakat hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pendidikan politik yang berikan suatu partai tersebut terhadap kader-kadernya. Hal yang senada diungkapkan oleh Bapak Mayuki (warga Kelurahan Darat Sekip):

“ Masyarakat sudah terlalu Capek dan pusing dibuatkan partai yang para kadernya berperilaku berubah, bukan hanya perilaku dari individu saja namun dengan sistem yang ribet membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya, selain dari sistemnya yang ribet, masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan partai yang ada, banyak bohongnya, kami berharap agar penyelenggara pemilu dapat menyeleksi partai dan calon yang sesuai dengan kriteria tidak sembarangan, agar masyarakat tidak merasa dirugikan”

#### **4. Faktor Metode Penyampaian Pesan**

Metode penyampaian pesan juga berkaitan dengan identitas Komisi Pemilihan Umum yang berdasarkan peraturan Undang-undang No.22 tahun 2007. Dilihat dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Dimana pendidikan politik adalah proses biologis diantara

pemberi dan penerima pesan. Namun sosialisasi yang dilakukan Kpu Kota Pontianak khususnya di Kelurahan Darat Sekip melalui proses indoktrinasi.

Proses indoktrinasi politik merupakan cara proses penurunan nilai-nilai/budaya politik yang dilakukan secara sepihak. Biasanya indoktrinasi politik dilakukan penguasa/pemimpin dengan cara memanipulasi masyarakat agar bersedia menerima nilai, norma serta simbol yang dianggap baik oleh penguasa. Berdasarkan wawancara penulis terhadap Bapak Sujadi (selaku ketua Kpu Kota Pontianak), mengatakan bahwa :

“Dalam metode penyampaian pesan Kpu Kota Pontianak selalu memberikan yang terbaik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Dengan adanya upaya sosialisasi politik yang intensif yang diberikan Kpu Kota Pontianak sangat berkesinambungan dalam masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran politik yang tinggi. Baik masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan maupun daerah pedesaan yang terpencil sekalipun. Minimal masyarakat dapat mengetahui apa, siapa, dan bagaimana struktur politik di negara mereka”.

Akan tetapi sosialisasi dalam bentuk indoktrinasi politik yang telah diberikan oleh Kpu Kota Pontianak ini tidak semata-mata langsung dapat diterima oleh

masyarakat, terdapat kendala-kendala yang telah digaris bawahi yang akan dihadapi oleh Kpu Kota Pontianak dalam upaya mensosialisasikan politik di Kota Pontianak. Sebagaimana yang dipaparkan langsung oleh Ibu Ana Suardiana (selaku Sekretaris Kpu Kota Pontianak), bahwa :

“Kendala dalam upaya penyampaian pesan yang dilakukan Kpu Kota Pontianak, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan turunnya Kpu ke masyarakat maka akan mengganggu aktifitas mereka. Masyarakat disini (Kelurahan darat sekip) waktu kami datang kerumahnya mereka hanya mengintip dari dalam dan tidak mau keluar rumah saat kami datang untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Walaupun ada masyarakat disini tingkat kesadaran politiknya kurang namun tidak semuanya begitu sebagian dari mereka menggunakan hak pilihnya saat Pemilu Legislatif 2014.”

Kurangnyakesadaran masyarakat terhadap pemilu membuat penyelenggara pemilu khususnya Kpu kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu legislatif 2014 berlangsung menjadi tugas Kpu Kota Pontianak tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan ikut menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung.

Terkait bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan ikut memberikan suaranya saat pemilu berlangsung dibutuhkan penyampaian pesan yang tepat dan jelas. Penyampaian pesan yang kerap dikumandang para elit politik hanya sebuah slogan tak bermakna. Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Andi (warga Kelurahan Darat Sekip), mengatakan:

“Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memang telah melakukan sosialisasi dengan baik, saya selaku masyarakat mengetahui bahwa akan dilaksanakannya pemilu legislatif 2014, saya mengetahuinya melalui spanduk, baliho yang tersebar dikelurahan tempat saya tinggal. Hanya saja saya tidak puas karena saya rasa tidak cukup hanya dengan sosialisasi tidak langsung karena masyarakat juga perlu diperjelas akan makna pemilu itu sendiri”

Memang masyarakat tidak puas dan tentu kurang mengerti jika sosialisasi hanya dilakukan melalui spanduk, baliho, dan sejenisnya, masyarakat butuh penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi secara langsung kemasyarakat.

Pendapat yang dipaparkan oleh Bapak Tugiman (warga Kelurahan Darat Sekip), mengatakan: “ Saya mengetahui akan diadakannya pemilu lihat dispanduk, menurut saya kurang maksimal karena masyarakat kan ingin tau lebih dalam bagaimana caranya memilih yang baik,

apalagi pemilu legislatif seperti sekarang banyak mengusung partai dan calonnya jg banyak, jadi membingungkan. Beda dengan pemilu presiden yang hanya 2 calon saja jadi mudah mengingatnya”.

Kondisi ini menuntut penyelenggara pemilu untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus. Hal tersebut sangat penting dilakukan, agar partai-partai politik memerankan dirinya sebagai masyarakat politik yang mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, khususnya tentang pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya dilakukan ditempat formal saja, tetapi bisa saja dilakukan di Rt/Rw agar masyarakat lebih menghayati makna dari pemilu tersebut. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Maryati (Warga Kelurahan Darat Sekip):

“ Tidak adanya pendidikan politik secara khusus, hanya memang ada selebaran dikasih oleh Rt seperti kartu, selain itu penyelenggaraan pemilu saya lihat di Tv TVRI. Bagi saya belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan pemilu tersebut, karena masyarakat disini banyak yang tidak mengetahui akan diadakannya pemilu”

Memang penyampain pesan yang baik, akan mempengaruhi penerima pesan yang baik pula, namun masyarakat merasa

perlu adanya pendekatan secara khusus karena masyarakat cenderung banyak tidak tahunya dibandingkan tahu atau pura-pura tidak tau dan tidak mau tahu seperti yang dinyatakan oleh Bapak Tugino (Warga Kelurahan Darat Sekip):

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### a) Kesimpulan

Kpu Kota Pontianak telah Mensosialisasikan Pemilu melalui mekanisme yang ada baik melalui spanduk, baliho, pamflet, dan stiker, maupun melalui simulasi di TPS, berbagai kegiatan lainnya telah dilakukan seperti KPPS Kelurahan Darat Sekip memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan mereka dibalai posyandu.

Dalam mensosialisasikan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentunya membutuhkan ekonomi yang cukup, maka dari itu per Rt/Rw dibiayai 1juta oleh Pemkot. Selain dari segi eonomi agar lancarnya sosialisasi maka adanya sistem politik yang statis bukan dinamis.

Terakhir yang dapat melancarkan pelaksanaan sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak , seperti metode penyampaian pesan yang lebih kearah Indoktrinisasi Politik merupakan proses sosialisasi yang dilakukan untuk

memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol politik.

## b) Saran

1. Perlu adanya Pelaksanaan sosialisasi politik ke masyarakat dengan lebih maksimal terkait cara evaluasi dan tahapan-tahapan yang dilalui KPU Kota Pontianak dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya.
2. Perlu biaya yang cukup untuk agar sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, karena sangat minim jika perkelurahan hanya dibiayai satu juta oleh Pemkot.
3. Perlu adanya keikutsertaan tokoh masyarakat dalam membantu pelaksanaan sosialisasi politik.
4. perlu ditingkatkan lagi terutama dalam bidang sosialisasi secara langsung, karena masyarakat butuh pendekatan dari penyelenggara pemilu tersebut.

Budiarjo, Miriam. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Firmanzah. 2011. **Mengelola Partai Politik**. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gaffar, Afan. 2006. **Politik Indonesia transisi menuju demokrasi**. Yogyakarta: pustaka belajar.

Gaffer, Janedjri M. 2013. **Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia**. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Mas'oed, Mohtard, dan Colin MacAndrews. 1997. **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Michael Rush And Phillip Althoff. 2002. **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Michael Rush And Phillip Althoff. 2011. **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy Z. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Rosda Karya.

Sanit, Arbi. 1985. **Perwakilan Politik Di Indonesia**. Jakarta: Rajawali.

Winarno, Budi. 2007. **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**. Jakarta: PT. Buku Kita

Sugiyono. 2007. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

Sugiyono. 2008. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku:

Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta

Alfian. 2010. **Sosiologi Politik**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## 2. Sumber Lainnya:

Undang-undang No 8 Tahun 2014, tentang Pemilu Legislatif

Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Koran Pontianak Post

Koran Harian Equator

Koran Borneo tribune

<https://www.academia.edu>.

**Pengertian Sosialisasi Politik** .Diakses tanggal 15 Mei 2015 dengan alamat:  
<http://www.pengertianahli.com/2013/12/html>

**Muhammadchoirulrosiqin. Budaya politik** .Diakses tanggal 5 April 2015 dengan alamat:

## 3. Sumber dari Skripsi:

Hijriyah Y (2013) dengan judul “Fungsi sosialisasi politik DPD partai Nasdem Kabupaten Gowa”

Yeny Wahyunny (2015) dengan Judul “Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Di Kabupaten Kubu Raya”

Suaidi A.Kadir dengan judul “Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2010 Di Kabupaten Melawi

## 4. Sumber Internet:

**Heri, Hirawan.2013.Pendidikan Politik di Indonesia.** Diakses pada tanggal 18 Mei 2015 dengan alamat:

Mashuri.2011.**Pendidikan Politik.** Diakses tanggal 15 Mei 2015 dengan alamat:  
<http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html>.

**Pemilu Legislatif** . Diakses tanggal 20 April 2015 dengan alamat:  
<http://Pemilu2014.kpu.go.id>.

**Pentingnya pendidikan politik untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas.** Diakses tanggal 4 September 2015 dengan alamat :



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EPARIA  
NIM / Periode lulus : E02111003/II  
Tanggal Lulus : 02 November 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Politik  
E-mail address/ HP : [Evakristina86@gmail.com](mailto:Evakristina86@gmail.com) / 082152589691

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi\*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 (STUDI DI KELURAHAN DARAT SEKIP KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*  
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal Aspirasi

Dr. Fahrudin, S.IP, M.Si  
NIP. 196911222002121002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 3 Desember 2015

EPARIA  
NIM. E02111003

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodem/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)